

BAB V

KESIMPULAN

Dari penelitian diatas kita dapat mengerti bahwa hubungan bilateral antar negara sangat penting untuk dijaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan negara yang telah dijalin dengan baik dan sejak lama dapat terganggu dan rusak apabila tidak adanya rasa saling menghormati keputusan masing-masing negara. Permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan Brasil adalah kedua negara memiliki pemahaman yang beda terkait eksekusi mati. Pemerintah Brasil melindungi rakyat nya yang akan di eksekusi mati di Indonesia dikarenakan kasus peredaran narkoba yang menjerat. Sebagai negara Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Brasil menentang keras eksekusi mati, karena dianggap tidak sesuai dengan HAM dan tidak menghormati nyawa manusia. Disisi lain Pemerintah Indonesia tetap kekeh dalam mempertahankan keputusannya dalam mengeksekusi mati terpidana kasus narkoba tersebut.

Narkoba merupakan kasus pidana yang tergolong berat atau *Extraordinary Crime* di Indonesia, karena dapat merusak ke generasi di masa depan. Selain itu pemerintah Indonesia sedang gencar dalam memberantas Narkoba. Presiden Jokowi menekankan bahwa dalam masa pemerintahannya untuk menekan berbagai pihak yang berwenang untuk menindak tegas dan tidak pandang bulu terkait kasus Narkoba yang sudah menjalar di Indonesia. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Presiden menginstruksikan secara langsung untuk menindak tegas pendistribusian Narkoba dari luar negeri.

Warga negara Brasil yang tertangkap membawa sejumlah Narkoba dengan sekala yang besar di wilayah Indonesia kemudian mendapatkan hukuman mati dari Kejaksaan Agung. Hal tersebut sudah merupakan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait penyalahgunaan Narkoba. Dalam kasus tersebut pemerintah Brasil menentang keras atas apa yang dilakukan pemeritah Indonesia terhadap salah satu rakyat nya. Pemerintah Brasil memberikan reaksi berupa menolak surat kepercayaan Diplomat Indonesia untuk Brasil. Selain itu, Brasil

juga menunda beberapa kesepakatan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Brasil.

Reaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Brasil menunjukkan bahwa pemerintah Brasil, Presiden Dilma Roussef tidak menghormati atas hukum yang berlaku di Indonesia. Negara punya wewenang masing-masing dalam menentukan hukum di negara nya sendiri tanpa ada interupsi dari negara lain. Respon yang dikeluarkan oleh pemerintah Brasil tersebut membuat hubungan kedua negara memburuk. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dengan segera menarik pulang diplomat Indonesia untuk Brasil dari kedutaan di Brasil.

Dalam kasus tersebut terdapat banyak unsur kepentingan didalam nya. Kepentingan Indonesia dalam mengeksekusi narapidana Narkoba tersebut adalah upaya komitmen Indonesia dalam memberantas Narkoba. Pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kepada rakyatnya maupun negara-negara lain terkait keseriusan nya dalam memberantas Narkoba di Indonesia. Sementara itu tentangan keras yang dikeluarka pihak pemerintah Brasil adalah merupakan komitmen Brasil dalam menegakkan HAM. Selain itu, Brasil melalui Presiden Dilma Roussef ingin menunjukkan di mata rakyat nya bahwa beliau seorang pemimpin yang tegas dan bertanggungjawab dalam menjaga rakyat negara nya.

Penulis menyimpulkan bahwa kasus konflik hubungan antar negara tersebut disebabkan perbedaan norma hukum di dalam kultur yang tumbuh di masyarakat masing-masing negara. Brasil yang merupakan jajahan dari Portugis dan banyak mengadopsi hukum dari Portugis dan negara-negara Eropa lainnya menjunjung tiinggi Hak Asassi Manusia (HAM), artinya bahwa nyawa manusia sangat berharga dan tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia dalam kondisi apapun meskipun dengan Kasus yang besar sekalipun. Selain itu mayoritas penduduk rayat Brasil merupakan pemeluk agama Katolik. Katolik melalui gereja-gereja dan Paus Paulus menyerukan tentang HAM dan menentang adanya eksekusi mati di negara-negara yang masih menggunakan eksekusi mati sebagai putusan hukum. Sementara di Indonesia, hukuman mati masih sangat dianggap relevan sebagai hukuman yang pantas bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap merugikan banyak orang dan generasi kedepan. Indonesia dalam hukum

mengadopsi dari tiga unsur yaitu, Hukum Eropa (bekas jajahan Belanda), Hukum Islam, Hukum adat. Negara Indonesia yang merupakan penganut agama Islam terbesar di Dunia meyakini bahwa hukuman mati merupakan salah satu prosedur hukum yang sah. Dalam Islam hukuman mati merupakan hukuman yang sah dan berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang berat.